

MENGELOLA RISIKO KELAPA SAWIT

LAPORAN SINGKAT UNTUK PEMODAL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor jasa keuangan Indonesia menghadapi risiko reputasi, regulasi, dan keuangan yang cukup besar jika terus mendukung perusahaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, tindakan untuk mengelola dampak buruk lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh praktik-praktik produksi kelapa sawit tidak berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, komunitas global, pembeli kelapa sawit, serta bank dan investor internasional hendaknya juga diikuti oleh sektor ini.

Tindakan para pemangku kepentingan ini terus meningkat, termasuk moratorium yang dikeluarkan pemerintah Indonesia atas izin baru di hutan primer, lahan gambut, dan ekspansi lebih lanjut. Tindakan ini juga mencakup komitmen negara-negara Eropa untuk hanya membeli kelapa sawit yang bersertifikat berkelanjutan pada tahun 2020. Semakin banyak perusahaan dalam rantai pasokan kelapa sawit berkomitmen untuk memproduksi dan mengambil bahan baku dari wilayah dan produsen yang mematuhi kriteria Bebas Deforestasi, Bebas Gambut, dan Bebas Eksploitasi (NDPE). Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengembangkan sistem penelusuran dan pemantauan serta menargetkan implementasi penuh kebijakan NDPE ini pada tahun 2020, sebuah target yang harus dicapai dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini berarti ada batasan prospek pertumbuhan jangka panjang sektor ini serta meningkatnya risiko bagi perusahaan kelapa sawit yang belum menerapkan praktik berkelanjutan. Dalam kondisi pasar dan regulasi saat ini, sekitar 75 persen lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi perkebunan sawit tidak dapat dibuka karena berada di dalam wilayah hutan atau lahan gambut.

Pedagang, penyuling, dan produsen barang konsumsi mungkin harus menghentikan sementara kontrak mereka dengan perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat mematuhi kebijakan keberlanjutan. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan perkebunan, sementara pada saat yang bersamaan biaya mungkin meningkat, antara lain karena denda akibat membakar lahan atau praktik-praktik tidak berkelanjutan lainnya.

Bagi bank yang membiayai sektor kelapa sawit Indonesia, perkembangan ini menyiratkan adanya peningkatan risiko kredit bermasalah (NPL). Di saat yang sama, terjadi penurunan nilai agunan – seringkali berupa lahan yang belum dikembangkan – yang berarti pinjaman yang beredar di sektor ini secara umum menjadi berkurang nilainya. Tekanan regulasi pada bank untuk mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam keputusan pemberian pinjaman juga meningkat dan jika bank terus-menerus terpapar masalah keberlanjutan di sektor kelapa sawit ini, reputasi mereka di mata nasabah ritel domestik dan investor asing dapat rusak. Hal ini akan menyulitkan bank dalam menarik pendanaan yang memadai dan memenuhi persyaratan solvabilitas.

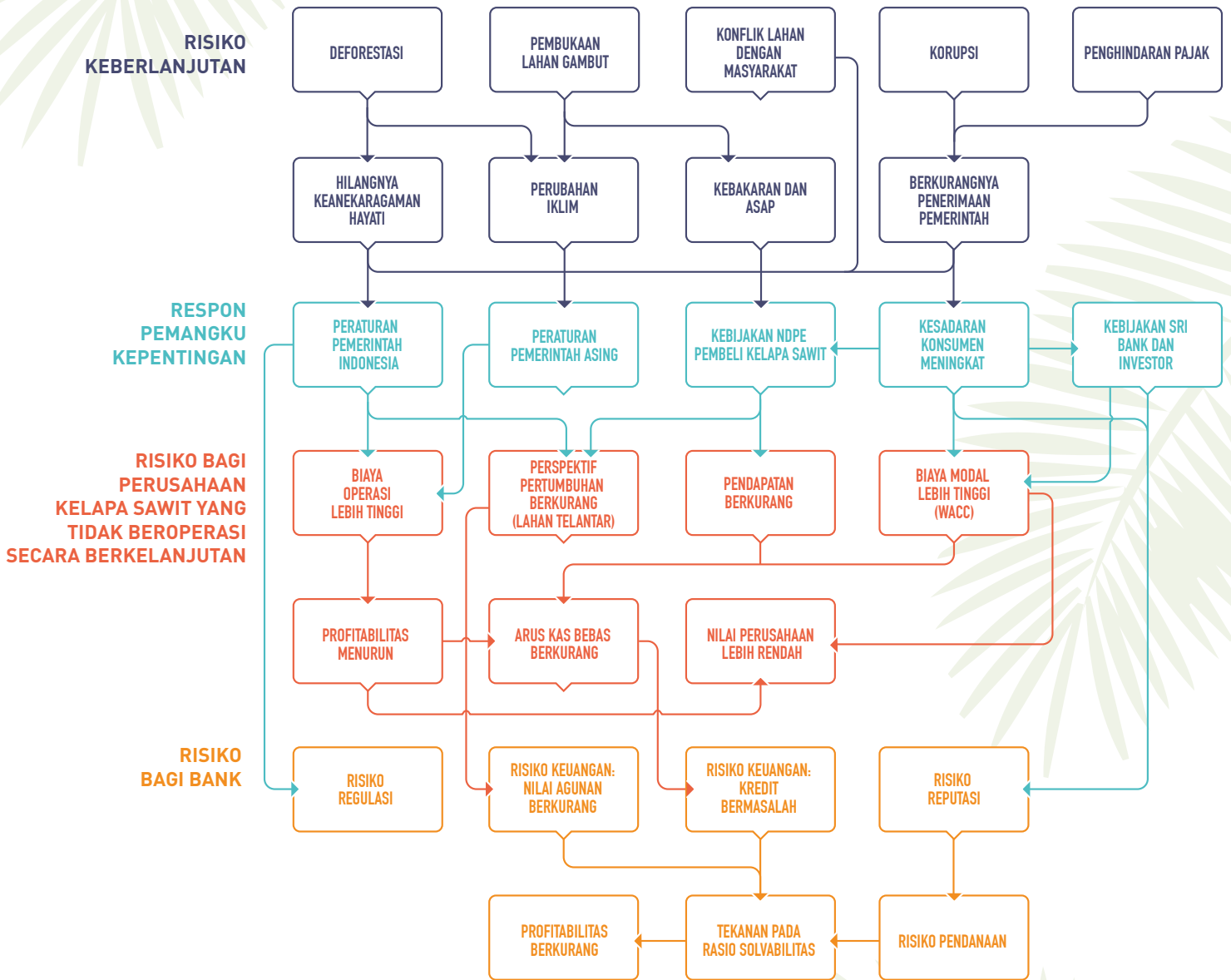
Bank telah mendapatkan keuntungan besar dari pertumbuhan pesat sektor kelapa sawit. Indonesia saat ini memimpin dalam ekspor kelapa sawit, yang menyumbang 12 persen dari nilai ekspor Indonesia di tahun 2016, dan pinjaman yang mendukung pengembangan sawit telah memberikan imbal hasil yang besar bagi bank. Sektor ini terus berkembang dan merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi setempat dan pengentasan kemiskinan dengan mempekerjakan kurang lebih 5,6 juta orang.

Akan tetapi, manfaat ekonomi ini diikuti oleh dampak biaya lingkungan dan sosial yang tinggi, termasuk konversi hutan tropis dan wilayah lain yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati menjadi perkebunan sawit. Kebakaran hutan besar di tahun 2015 — yang diperkirakan menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dini di Indonesia, Singapura, dan Malaysia — menegaskan pentingnya hutan dan lahan gambut yang sehat bagi ekosistem kita. Ratusan konflik antara perkebunan sawit dan masyarakat setempat mengenai hak pengolahan tanah yang terjadi di seluruh Indonesia juga semakin menarik perhatian, seperti halnya potensi terjadinya korupsi serta rasio kepatuhan pajak yang rendah di sektor kelapa sawit, yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para pemangku kepentingan utama kini mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko keberlanjutan, dan lingkungan baru ini memunculkan risiko reputasi, regulasi, serta finansial yang signifikan bagi perbankan di Indonesia yang terpapar rantai nilai kelapa sawit, terutama di hulu. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan bank untuk mengelola risiko-risiko ini mencakup penyaringan portofolio, pengembangan kebijakan keberlanjutan, serta pelibatan perusahaan kelapa sawit yang menjadi nasabah mereka untuk mendukung perubahan. Sudah saatnya sektor jasa keuangan Indonesia bergabung dengan gerakan menuju keberlanjutan dan menjamin masa depan yang stabil dan makmur.

Makalah ini terdiri atas tiga bab dengan struktur seperti dijabarkan pada Gambar 1, yang menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah dan swasta dalam menangani produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan risiko keuangan bagi produsen kelapa sawit maupun kreditur mereka. Bab 1 membahas risiko sektor kelapa sawit yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan dan pemodal, dan Bab 2 menyoroti manfaat investasi pada kelapa sawit berkelanjutan. Bab 3 menutup laporan singkat ini dengan rekomendasi praktis bagi bank yang ingin menangani risiko yang mungkin muncul akibat berkaitan dengan praktik-praktik kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.

DARI RISIKO BERKELANJUTAN KE RISIKO FINANSIAL



Untuk mengunduh dokumen lengkap dan ringkasan eksekutif dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia silahkan kunjungi halaman website www.rspo.org

